

**Kode>Nama Rumpun Ilmu : 562/Akuntansi**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN**



**PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA LANGSUNG  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2020**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**Siska Yulia Defitri, SE. M.Si/ 1023078301/ Ketua  
Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304/Anggota**

**UNIVERSITAS MAHA PUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK  
FEBRUARI 2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020

**Peneliti/Pelaksana** :

**Nama Lengkap** : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

**NIDN** : 1023078301

**Jabatan Fungsional** : Lektor

**Program Studi** : Akuntansi

**Fakultas** : Ekonomi

**Nomor HP** : 085355066166

**Alamat surel (e-mail)** : siskayd023@gmail.com

**Anggota Tim** :

**Nama Lengkap** : Witra Maison, SE. M.Si

**NIDN** : 1022026304

**Perguruan Tinggi** : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

**Tahun Pelaksanaan** : 2020/2021

**Sumber Dana** : Mandiri

**Biaya Tahun Berjalan** : Rp. 7.500.000,-

**Biaya Keseluruhan** : Rp. 7.500.000,-

Solok, 01 Februari 2021

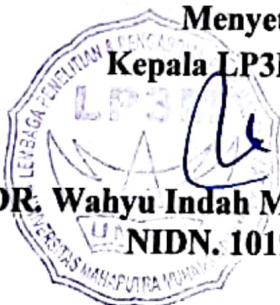


**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**

(Julia Surkaini, SE- M. Si)  
NIDN. 1017016201

**Ketua,**

( Siska Yulia Defitri, SE. M.Si )  
NIDN. 1023078301



**Menyetujui,**

**Kepala LP3M UMMY**

( DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM )  
NIDN. 1019017402

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. METODE .....</b>	<b>14</b>
<b>4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
<b>6. DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **PENGARUH REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2020**

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Langsung Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jenis data yang digunakan adalah data skunder berupa laporan keuangan yang di peroleh dari <http://sumbar.bps.go.id>. analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, koefisien determinasi *r-square* dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $13.895 > 1,6657$ , dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $13.251 > 1,6657$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . (3) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $180.883 > 2,34$  dengan nilai signifikannya  $0,00 < 0,05$ .

**Kata kunci: Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah dan desentralisasi secara legal formal masing-masing telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah serta pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah (Syariah et al., 2019).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok

belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuansosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No.33 Tahun 2004). Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standarpelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah karena hal ini merupakan kinerja pemerintah daerah sebagai mana fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor public karena peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah dapat menempuh dengan cara mengoptimalkan potensi penerimaan yang antara lain berupa Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang asli, dan DAU. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengadaan barang dan jasa dalam rangka perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan lainnya. Namun demikian di provinsi Sumatra barat masih belum meratanya pelayanan yang di berikan oleh kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan yang berupa fasilitas umum, dimana masih kita temukan daerah yang minim dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula

bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut di atas diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan urutan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

1. Apakah realisasi pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Apakah realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja langsung Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota Sumatera barat.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera barat.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi umum secara simultan terhadap belanja langsung pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini bisa di manfaatkan, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya:

1. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi daerah dalam peningkatan kualitas

- pelayanan publik dan kemajuan kabupaten/ kota di provinsi Sumatra barat.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan lagi judul penelitian ini dan sebagai sumber ilmu pengetahuan.
  3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan ilmu untuk lebih mengetahui bagaimana salah satu kinerja pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatra barat.

## **II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Target pendapatan daerah merupakan perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan didalam penyusunannya memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhitungkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014*)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.1.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak, Boediono dan Damas Dwi Anggoro (2013:112) . Dalam hal memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud

digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

1. .Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukarmenukar, hibah, warisan. Atau pemasukan ke dalam badan usaha.



3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah, Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Jenis pajak kabupaten/kota provinsi Sumatra Barat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton, atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga
9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatam, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengambilan air tanah.
14. Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
15. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan sebagainya.
16. Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **2.1.2 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah, Adapun retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **1. Jasa Umum**

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

#### **2. Jasa Usaha**

jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

#### **3. Perizinan Tertentu**

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,

#### **4. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

#### **5. Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain**

PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera barat.

## 2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi di artikan sebagai perwujudan nyata atau proses nyata, jadi realisasi pendapatan asli daerah adalah perwujudan nyata dari sumber dana pendapatan asli daerah. Naik turun nya realisasi pendapatan asli daerah tergantung dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlihat pada realisasi dari tiap satuan kerja yang memiliki objek penerimaan, yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala dan hambatan, yaitu relatif masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan, mekanisme pengadministrasian belum terlaksana dengan baik dan masih kurangnya kesadaran para wajib pajak/retribusi

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi Gita, 2013), oleh karena itu tinggi rendahnya pendapatan asli daerah tergantung pada potensi dari daerah masing-masing dan juga tergantung pada pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Potensi daerah yang melimpah, apabila dikelola secara baik dan maksimal oleh pemerintah daerahnya, tentu saja akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk 19 kabupaten/kota di Sumatera barat yang dijadikan sampel, untuk tahun 2016-2020.

**PAD= Pajak Daerah+Retribusi Daerah+hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan+ lain-lain PAD yang sah.**

## 2.3 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan pasal 1 Ayat 47 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Permendagri No33 tahun 2019 DAU bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal ini peraturan presiden di maksudkan belum di tetapkan. Penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada

alokasi DAU tahun anggaran 2019.

Apabila peraturan presidendi tetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan aloksi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau di tamping dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata.

Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan( Jumlah penduduk,Luas wilayah,Indeks kemahalan konstruksi, Produk domestik bruto regional perkapita, dan Indeks pembangunan manusia )

#### **2.4 Belanja Langsung**

$$\text{DAU} = 90\% \times 25\% \times \text{PDN (pendapatan dalam negri)} \times \text{bobot DAU}$$

Menurut PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahbelanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap tahunnya dan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jasa dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat (Hidayah&Hari, 2014)

Menurut permendagri Nomor 13 Tahun2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan melaksanakan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakssanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPDsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya yang baik berupa personil( sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, ataaau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan pengeluaran (*output*) dalam bentuk pelayanan. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50 pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006 , Kelompok belanja langsung menurut jenis belanja yang terdiri dari:

### **2.5.1 Belanja pegawai**

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah ( Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan).

### **2.5.2 Belanja barang dan jasa**

Barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pemerintah daerah (pemda) dan belanja perjalanan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

### **2.5.3 Belanja modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja

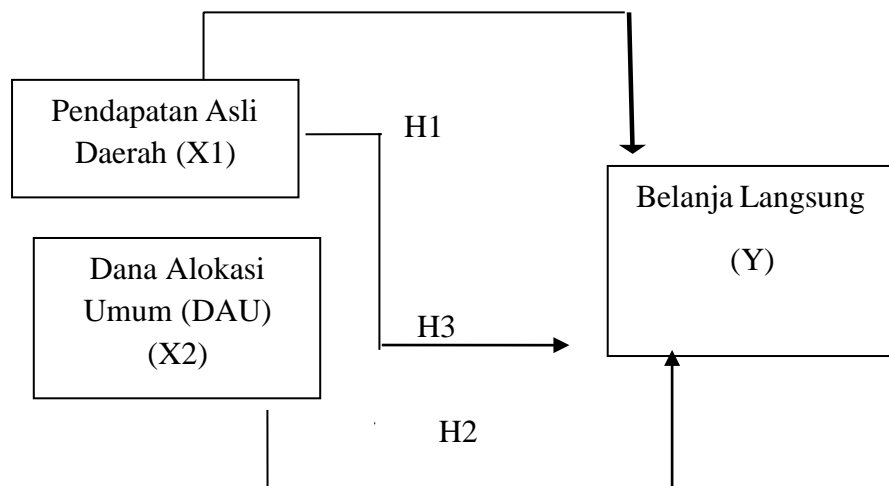
honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Jadi untuk mendapatkan hasil dari dana belanja langsung adalah

**Belanja Langsung= belanja pegawai+ belanja barang dan jasa+belanja modal**

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumberpajak daerah Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga). Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.



**Gambar 2.1**  
Kerangka Pemikiran

## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

### **2.8.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Dan et al., 2010).

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja langsung.

### **2.8.2 Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung.**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat

Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Dan et al., 2010)

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja langsung.

### **III METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif asosiatif. penelitian asosiatif adalah jenis penelitian yang menganalisis pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sugiyono(2012;1). Penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Terhadap Belanja Langsung (Y)

#### **3.2 Populasi Dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya Kurniawan Sudaryono(2017;80). Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah kabupaten/kota Sumatera barat.

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sample dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sample. Yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BAKEUDA) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016 – 2020.

#### **3.3 Jenis Dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Sugiyono, 2012:128) laporan realisasi anggaran pendapatan dan



belanja daerah (APBD) dari seluruh pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera barat. Sumber data ini diperoleh dari website badan pusatstatistik provinsi Sumatera barat yaitu: <http://sumbar.bps.go.id>

### **3.3.2 Sumber Data**

Data sekunder dapat didapat dari buku, jurnal atau berbagai bentuk terbitan secara periodik oleh organisasi atau instansi tertentu. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari laporan keuangan yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data.**

Teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel Dan Variabel Penelitian**

#### **3.5.1 Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung (Y). variabel indenpenden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2)

#### **3.5.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel diperlukan dalam menentukan variabel penelitian, defenisi operasional, pengukuran, dan satuan dari variabel variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent atau variabel bebas (Sugiyono, 2018;39). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Realisasi Pendapatan Daerah (X1) Dana Alokasi Uum (X2)

- 2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen atau disebut juga variabel terikat. Variabel

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas(Sugiyono, 2018;39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung (Y).

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional Variabel Dan Indikator Pengukur**

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Satuan
1	Pengaruh realisasi pendapatan asli daerah (X1)	pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah (Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	Rupiah
2	Dana alokasi umum (X2)	dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)	DAU= 90% X25% X PDN (pendapatan dalam negeri) XBobot DAU	Rupiah
3	Belanja langsung (Y)	Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan melaksanakan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD. (Menurut permendagri Nomor 13 Tahun2006)	BL = belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal (Menurut permendagri Nomor 13 Tahun2006)	Rupiah

### **3.6 Metode Analisis Data.**

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. SPSS merupakan program computer yang terpakai untuk analisis statistika. SPSS memberikan teknologi kepada pengguna grafik dan visualisasi straktif guna membantu dengan analisis mereka dan untuk memastikan mereka mengumpulkan informasi jelas dan benar dari data statistic mereka. SPSS dapat memberikan teknologi pengelolaan data seperti statistic deskriptif, table kontigensi, regresi, uji ANOVA, dan lain-lain.

#### **3.6.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, terhadap belanja langsung

#### **3.6.2. Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Menurut Ghazali (2013;160), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas yaitu :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garisdiagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

##### **2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen, Ghozali (2018;107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabelindependen dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor* dan *Tolerance Value*). Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian. Sebaiknya,apabila nilai toleransi kurang dari 0,1 dan VIF lebih besar dari 10 maka terdapat multikolinearitas

##### **3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali (2018:137) ).

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), Ghozali, (2018:111). Uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Jika nilai Durbin- Watson berkisar antara nilai batas atas (du) maka diperkirakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

#### 3.6.3 Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sunyoto, 2016:47). Analisis regresi linear berganda diperlukan guna mengetahui koefisien-koefisien regresi serta signifikan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab hipotesis. Adapun model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Langsung

a = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum

e = Standard error

#### 3.7.4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

### 3.7.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi, Ghazali(2013;160) :

- a. Jika  $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$  dan nilai signifikannya  $\leq 0,05$  artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$  dan nilai signifikannya  $\geq 0,05$  artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.7.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai  $Sig. F < \alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan nilai  $Sig. F > \alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

### 3.7.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

koefisien determinasi  $R^2$  adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat, Ghazali (2013;97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai 1. Semakin kecil nilai  $R^2$  berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terdapat, sedangkan koefisien determinasi yang semakin mendekati nilai 1 menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variasi variabel terkait sehingga mendekati sempurna. Apabila teknik analisis datanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas, kita menggunakan *R square*, tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari dua maka lebih baik menggunakan *Adjusted R* yang nilainya selalu lebih kecil dari *R square* nilai determinasi ditentukan dengan nilai *R square*. Ghazali (2013;97). Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yang digunakan dalam menguji koefisien determinasinya adalah *R square*.

## IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Barat periode 2017 – 2020, yang di peroleh dari website badan pusat statistik Sumatra Barat. penelitian ini memilik 76 sampel (19 Daerah x 4 tahun). Berikut daftar nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2020.

#### 4.1.1 Hasil Analisis Data

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan bantuan program aplikasi SPSS (Statistik Product and Service Solutions) versi 25.0. Analisis data dan hasil pengolahan data penelitian dijelaskan sebagai berikut:

##### 4.1.1.1 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019. Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020 tersebut diperoleh dari badan pusat statistik provinsi Sumatra barat dengan website yaitu:

<http://sumbar.bps.go.id>

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Besarnya pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sumatra barat dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang sudah ada dalam Laporan Realisasi APBD. Berikut data Pendapatan Asli Daerah masing – masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode tahun 2016 – 2019 :

**Tabel 4.1**

**Data Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Periode 2017– 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp. 68.477.676.600	Rp. 45.358.184.270.	Rp. 40.063.395.070	Rp. 50.316.759
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp.176.902.866.670	Rp.123.906.524.440	Rp.134.804.594.000	Rp.156.419.589
3.	Kabupaten Solok	Rp.113.269.815.420	Rp. 67.936.258.790	Rp. 74.595.778.020	Rp . 75.296.758
4.	Kabupaten Sijunjung	Rp.107.915.721.000	Rp. 79.055.940.000	Rp. 83.906.454.920	Rp. 58.785.769
5.	Kabupaten Tanah Datar	Rp.172.812.023.000	Rp.115.914.188.000	Rp.129.785.828.000	Rp.165.000.448
6.	Kabupaten Padang Pariaman	Rp.141.310.805.690	Rp. 84.472.664.000	Rp.101.607.521.620	Rp.109.467.232
7.	Kabupaten Agam	Rp.161.539.091.000	Rp. 99.684.205.000	Rp.123.658.589.000	Rp.125.059.320
8.	Kabupaten Limapuluh Kota	Rp.119.771.917.000	Rp. 73.442.509.000	Rp. 85.168.153.330	Rp.100.575.904
9.	Kabupaten Pasaman	Rp.142.748.233.330	Rp.100.054.438.440	Rp. 98.595.691.290	Rp. 95.921.682
10.	Kabupaten Solok Selatan	Rp. 75.588.033.100	Rp. 60.545.296.360	Rp. 67.842.785.840	Rp. 70.918.707
11.	Kabupaten Dharmasraya	Rp. 98.937.393.390	Rp. 84.116.203.860	Rp. 78.882.919.150	Rp.104.794.164
12.	Kabupaten Pasaman Barat	Rp.158.920.863.870	Rp.158.872.998.660	Rp.104.052.818.020	Rp.142.978.775
13.	Kota Padang	Rp.548.653.179.270	Rp.487.834.642.410	Rp.546.108.570.000	Rp.881.995.807
14.	Kota Solok	Rp. 41.852.774.000	Rp. 40.742.809.000	Rp. 41.651.875.800	Rp. 46.000.000
15.	Kota Sawah Lunto	Rp. 63.082.759.000	Rp. 47.227.132.000	Rp. 57.170.994.000	Rp. 61.765.679
16.	Kota Padang Panjang	Rp. 88.837.034.000	Rp. 79.752.372.000	Rp. 77.323.150.460	Rp. 97.543.850
17.	Kota Bukittinggi	Rp.102.022.621.330	Rp.101.936.793.000	Rp.111.896.596.610	Rp.151.437.935
18.	Kota Payakumbuh	Rp.116.596.479.800	Rp. 94.287.442.040.	Rp.104.070.234.520	Rp.122.250.123
19.	Kota Pariaman	Rp. 30.881.846.110	Rp. 32.213.303.040	Rp. 36.665.174.230	Rp. 33.787.684

Sumber: badan pusat statistic Sumatra barat (<https://sumbar.go.id>)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan pendapatan asli daerah 4tahun secara berturut-turut adalah, daerah dengan pendapatan asli daerah

tertinggi adalah Kota Padang tahun 2019 sebesar Rp.546.108.570.000, dan yang terendah adalah pada Kota Pariaman tahun 2017 sebesar Rp.30.881.846.110. Tinggi rendahnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan ada keputusan atau tindakan daerah dalam menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah (Mahmudi,2009;18).

#### 4 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Besarnya dana alokasi umum Kabupaten/Kota Sumatera barat dapat dilihat dari jumlah dana alokasi umum setiap tahunnya yang sudah ada dalam Laporan Realisasi APBD. Berikut data Pendapatan Asli Daerah masing – masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode tahun 2016 – 2019 :

**Tabel 4.2**  
**Data Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**  
**Periode 2017-2020**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp. 597.919.262	Rp. 610.487.048	Rp. 623.196.979	Rp. 631.842.621
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. 853.086.114	Rp. 838.100.134	Rp. 859.754.884	Rp. 875.846.349
3.	Kabupaten Solok	Rp. 723.675.565	Rp. 710.962.915	Rp. 728.558.349	Rp. 737.805.913
4.	Kabupaten Sijunjung	Rp. 558.382.085	Rp. 548.573.107	Rp. 560.403.310	Rp. 513.243.250
5.	Kabupaten Tanah Datar	Rp. 707.992.904	Rp. 695.555.745	Rp. 714.102.850	Rp. 722.686.294
6.	Kabupaten Padang Pariaman	Rp. 811.968.309	Rp. 769.872.010	Rp. 790.451.964	Rp. 800.876.522
7.	Kabupaten Agam	Rp. 872.998.049	Rp. 813.474.914	Rp. 834.935.989	Rp. 814.100.405
8.	Kabupaten Limapuluh Kota	Rp. 760.431.504	Rp. 747.073.168	Rp. 766.871.792	Rp. 780710271
9.	Kabupaten Pasaman	Rp. 606.741.992	Rp. 596.083.485	Rp. 609.084.500	Rp. 619246725
10.	Kabupaten Solok Selatan	Rp. 488.996.271	Rp. 480.406.179	Rp. 609.084.500	Rp. 499452380
11.	Kabupaten Dharmasraya	Rp. 507.913.222	Rp. 501.889.284	Rp. 658.505.223	Rp. 535658048
12.	Kabupaten Pasaman Barat	Rp. 679.605.366	Rp. 644.333.727	Rp. 658.505.223	Rp. 672911164
13.	Kota Padang	Rp.1.180.886.259	Rp.1.100.370.559	Rp. 1.169.051.129	Rp.1.183.725.491
14.	Kota Solok	Rp. 405.224.758	Rp. 398.106.263	Rp. 410.905.144	Rp. 413804050
15.	Kota Sawah Lunto	Rp. 381.838.808	Rp. 374.920.212	Rp. 387.070.806	Rp. 391545423
16.	Kota Padang Panjang	Rp. 382.149.494	Rp. 375.436.356	Rp. 388.615.652	Rp. 391198830
17.	Kota Bukittinggi	Rp. 458.968.482	Rp. 450.905.882	Rp. 468.422.823	Rp. 470291251
18.	Kota Payakumbuh	Rp. 437.696.934	Rp. 437.696.934	Rp. 464.398.706	Rp. 465684926
19.	Kota Pariaman	Rp. 437.972.159	Rp. 415.241.327	Rp. 429.494.369	Rp. 391516784

*Sumber: badan pusat statistic Sumatera barat (<https://sumbar.go.id>)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan DAU Sumatera barat selama 4 tahun Berturut-turut, bahwa daerah dengan dana alokasi umum tertinggi adalah Kota Padang tahun 2020 sebesar Rp.1.183.725.491, yang merupakan ibukota provinsi sumbar. Dan yang terendah adalah Kota Sawah Lunto pada tahun2018 sebesar Rp.374.920.212 yang merupakan kota yang dikelilingi oleh tiga kabupaten( kabupaten tanah datar, kabupaten solok, kabupaten sijunjung). Dengan tingginya dana alokasi umum yang di butuhkan oleh daerah, maka APBN besar

dan ini juga mendorong kemajuan dari daerah tersebut.

## 5 Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap tahunnya dan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jasa dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat. Besarnya belanja langsung negaraa dapat dilihat dari jumlah belanja langsung setiap tahunnya yang sudah ada dalam Laporan Realisasi APBD. Berikut data Pendapatan Asli Daerah masing –masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode tahun 2017 – 2020 :

**Tabel 4.3**  
**Data Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**  
**Periode 2017 – 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp. 900.112.941	Rp. 547.017.227	Rp. 734.689.832	Rp. 586.621.767
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp. 602.481.197	Rp. 640.794.272	Rp. 814.789.519	Rp. 805.277.147
3.	Kabupaten Solok	Rp. 456.970.449	Rp. 444.967.668	Rp. 489.102.727	Rp. 423.586.801
4.	Kabupaten Sijunjung	Rp. 518.668.771	Rp. 466.829.809	Rp. 463.381.406	Rp. 326.324.694
5.	Kabupaten Tanah Datar	Rp. 498.713.991	Rp. 471.342.502	Rp. 590.369.047	Rp. 562.973.416
6.	Kabupaten Padang Pariaman	Rp. 603.805.880	Rp. 598.732.252	Rp. 711.482.243	Rp. 586.831.656
7.	Kabupaten Agam	Rp. 578.437.972	Rp. 548.642.326	Rp. 642.848.495	Rp. 595.966.403
8.	Kabupaten Limapuluh Kota	Rp. 540.488.655	Rp. 471.399.956	Rp. 608.712.859	Rp. 577.156.354
9.	Kabupaten Pasaman	Rp. 519.772.996	Rp. 430.564.186	Rp. 459.698.129	Rp. 462.489.324
10.	Kabupaten Solok Selatan	Rp. 435.476.376	Rp. 388.176.961	Rp. 331.545.061	Rp. 450.143.439
11.	Kabupaten Dharmasraya	Rp. 565.690.749	Rp. 459.860.786	Rp. 492.862.217	Rp. 512.680.773
12.	Kabupaten Pasaman Barat	Rp. 573.261.661	Rp. 607.186.127	Rp. 685.574.006	Rp. 650.668.270
13.	Kota Padang	Rp.1.140.839.383	Rp.1.131.846.230	Rp.1.468.112.680	Rp.1.485.199.511
14.	Kota Solok	Rp. 348.005.405	Rp. 413.358.504	Rp. 430.136.913	Rp. 396.942.460
15.	Kota Sawah Lunto	Rp. 395.531.448	Rp. 272.576.531	Rp. 363.236.021	Rp. 357.837.138
16.	Kota Padang Panjang	Rp. 493.535.980	Rp. 349.632.479	Rp. 400.374.844	Rp. 357.759.930
17.	Kota Bukittinggi	Rp. 559.404.670	Rp. 401.075.522	Rp. 533.598.887	Rp. 625.283.168
18.	Kota Payakumbuh	Rp. 450.084.700	Rp. 402.534.043	Rp. 516.598.869	Rp. 479.600.086
19.	Kota Pariaman	Rp. 370.913.393	Rp. 305.463.362	Rp. 384.334.955	Rp. 282.703.488

*Sumber: badan pusat statistic Sumatera barat (<https://sumbar.go.id>)*

Berdasarkan tabel belanja langsung diatas dapat dilihat perbandingan selama 4 tahun berturut-turt bahwa daerah dengan belanja langsung tertinggi adalah kota Padang pada tahun 2020 dengan jumlah sebesar Rp.1.485.199.511dan yang terendah adalah Kota Sawah Lunto pada tahun2018 dengan jumlah sebsar Rp.272.576.531. banyak nya belanja langsung suatu daerah merupakan kebutuhan masing – masing daerah untuk pembangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan lainnya.

### 4.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data



dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut tabel statistik deskriptif penelitian ini:

**Tabel 4.4 Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Pendapatan Asli Daerah	76	30881846	881995807	121784767.52526315	128036557.272061040
Dana Alokasi Umum	76	375131128	1183725491	615672487.61	196281881.542
Belanja Langsung	76	439987.86	1485199511	539080466.6617104	229744436.4782038
Valid N (listwise)	76				

Sumber: Output SPSS Versi 25.00(2021)

Berdasarkan table 4.4 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah data (N) dari penelitian ini sebanyak 76. Dari 76 jumlah data pendapatan asli daerah, nilai minimum sebesar Rp.30.881.846, nilai maksimum sebesar Rp.881.995.807, dari periode 2017-2020 diketahui nilai mean sebesar Rp.121.784.767, serta nilai standar deviasi sebesar Rp.128.036.557, yang artinya nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Dana Alokasi Umum dari 76 jumlah data diketahui bahwa nilai minimum sebesar, Rp.375.131.128, nilai maksimum sebesar Rp. 1.183.725.491, nilai mean dari periode 2017-2020 sebesar Rp. 615.672.487, serta nilai standar deviasi sebesar Rp.196.281.881. artinya nilai mean Dana Alokasi Umum periode 2017-2020 lebih besar mean sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka nilai penyebarannya merata. Belanja langsung dari 76 jumlah data yang diketahui bahwa nilai minimum Rp.439.987, yang nilai maksimum sebesar Rp.1.485.199, nilai mean dari periode 2017-2020 adalah Rp.539.080.466, dengan standar deviasi sebesar Rp.229.744.436, artinya nilai mean lebih besar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah penyebaran nilainya merata. Sehingga dapat memudahkan penelitian dalam pengolahan data dengan uji data dengan uji data berikutnya.

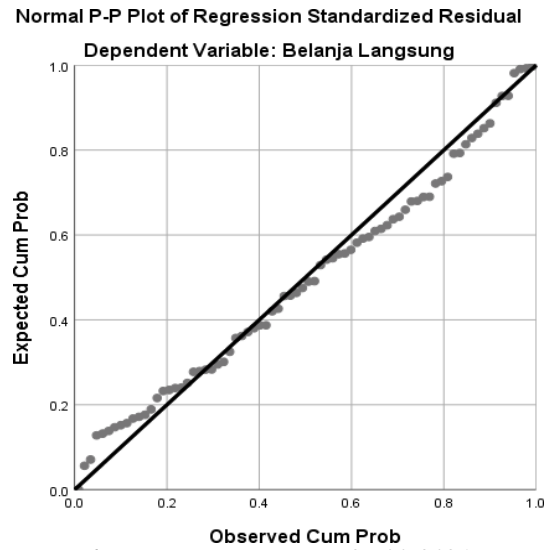
#### 4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil analisis menggunakan IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25.0 uji normalitas dengan menggunakan normal P-P Plot, hasil pengujian uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas atau data terdistribusi secara normal.

**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas**



*Sumber: Output SPSS Versi 25.00(2021)*

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan gambar tersebut, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dan penelitian dapat dilanjutkan.

**2. Uji Multikolinearitas**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variable independen. Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari angka 0,01 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,01 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	.489	2.044
	Dana Alokasi Umum	.489	2.044

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

*Sumber: Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS Versi 25.00*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 di atas, maka didapatkan hasil bahwa nilai tolerance dan VIF untuk pendapatan Asli Daerah sebesar 0,489 dan 2,044. Sedangkan untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,489 dan 2,044. Karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen. Data yang tidak terjadi multikolinearitas memiliki arti bahwa, diantara variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X) tidak saling berkorelasi. Sehingga dapat diartikan bahwa data tersebut tidak terjadi masalah serta nilai koefisien regresi dapat dikatakan handal dan kebal terhadap perubahan - perubahan yang terjadi pada variabel lainnya didalam model regresi sederhana. Maka dari itu, hasil pengujian dapat dipercaya dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual data pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut dengan homoskedastisitas sedangkan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Adapun cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.2**

#### 4.1.4 Analisis Regresi Berganda

Dengan menggunakan program SPSS versi 25.0 data pada tabel diatas dapat diolah untuk dapat menunjukkan adanya pengaruh atau tidaknya antara variabel independen yaitu risiko sukuk (X) dengan variabel dependen yaitu last yield sukuk (Y). hasil analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	86639290.386	41563530.204		2.085	.041
	Pendapatan Asli Daerah	.920	.123	.513	7.477	.000
	Dana Alokasi Umum	.553	.080	.472	6.889	.000

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Sumber: Output SPSS Versi 25.00(2021)

Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari hasil SPSS tersebut, maka model regresi linear sederhana dapat diketahui dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 86.639.290,386 + 0,920 X_1 + 0,553 X_2 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 86.639.290,386 pada persamaan regresi tersebut

mengidentifikasi bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), bernilai tetap maka Belanja Langsung(Y) adalah sebesar 86.639.290,386 rupiah.

2. Nilai Koefisien variabel Pendapatan asli daerah (X1) bernilai positif mengidentifikasi bahwa jika nilai pendapatan asli daerah naik 1rupiah, maka belanja langsung(Y) akan naik terjadi peningkatan variabel pendapatan asli daerah satu rupiah maka belanja langsung(Y) akan naik sebesar 0,920 rupiah, dengan asumsi Dana Alokasi Umum (X2) bernilai tetap(nol).
3. Koefisien variabel Dana Alokasi Umum (X2) bernilai positif , hal ini mengidentifikasi bahwa, jika nilai Dana Alokasi Umum naik 1 rupiah, maka Belanja Langsung(Y) akan naik sebesar 0,553rupiah, dengan asumsi nilai Pendapan Asli Daerah (X1) bernilai tetap.

#### 4.1.5 Uji Hipotesis

##### 1. Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing – masing variabel secara individual terhadap variabel tidak bebas. Pengujian secara parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel bebas secara parsial atau sendiri – sendiri mempunyai pengaruh tidaknya terhadap variabel terikat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika  $|t_{hitung}| \geq t_{tabel}$  dan nilai nilai signifikansi uji t  $< 0,05$  maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independenberpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $|t_{hitung}| \leq t_{tabel}$  dan nilai signifikannya uji t  $> 0,05$  maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut tabel hasil uji t dari penelitian ini yaitu :

**Tabel 4.8**  
**Uji t (t-est)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	86639290.386	41563530.204		2.085	.041
	Pendapatan Asli Daerah	.920	.123	.513	7.477	.000
	Dana Alokasi Umum	.553	.080	.472	6.889	.000

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

*Sumber : output SPSS 25 (2021)*

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja langsung dapat dilihat dari tanda dan tingkat

signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana aloksi umum terhadap belanja langsung berhubungan positif dan memiliki tingkat  $< 0,05$  dengan ketentuan  $T_{tabel}$   $df=(n-k)$ :

$T_{tabel} = df = (n-k)$ $= 76-2 = 74$
---

1. Nilai thitung  $7,447 > t_{tabel} 1,6657$  dan nilai signifikasi t dari X1 sebesar  $0,000 < 0,5$ . sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yaitu adanya pengaruh Pendapatan Asli Umum terhadap Belanja Langsung.
2. Nilai thitung  $6,889 > t_{tabel} 1,6657$  dan nilai signifikasi t dari X2 sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima yaitu adanya Dana Alokasi Umum terhadap BelanjaLangsung.

## 2 Uji F

Uji statistik F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau uji simultan. Untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai  $Sig. F < 0,05$ , artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas secara bersama- sama terhadap variabel terikat.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan nilai  $Sig. F > 0,05$  artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas secara variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 25, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.9  
Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3293999800422 685200.000	2	1646999900211 342590.000	180.883	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6646881565288 69380.000	73	9105317212724 238.000		
	Total	3958687956951 554600.000	75			
a. Dependent Variable: Belanja Langsung						
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah						

Sumber : output SPSS 25 (2021)

Dapat dilihat dengan tanda atau ketentuan  $f_{tabel}$ ,  $df = k - n$ :

$T_{tabel} = df = (n - k)$ $= 76 - 2 = 74$
--

Dengan nilai  $f_{tabel}$  yang jumlahnya 76 dan  $\alpha = 5\%$   $df = 74$  sebesar 2,34, Dari hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  180,883 >  $F_{tabel}$  2,34 dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), secara simultan terhadap Belanja Langsung (Y).

#### 4.1.6 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinansi (R<sup>2</sup>) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi dan dapat menjelaskan variabel dependennya. Dalam Penelitian ini R<sup>2</sup> yang digunakan adalah nilai R square. Dari hasil analisis data menggunakan program IBM SPSS 25.0 telah dihasilkan tabel hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Table 4.10  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 <sup>a</sup>	.832	.827	95421785.83 91061400000 00
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah				
b. Dependent Variable: Belanja Langsung				

*Sumber: Output SPSS Versi 25.00(2021)*

Dari table diatas diketahui bahwa adjusted R square sebesar 0,832 atau 83,2%. Hal ini berarti 83,2% dari variabel dependenyaitu Belanja Langsung dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum(X2).sedangkan sisanya 16,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti contoh Dana Alokasi Khusus Ardani (2011).

#### 4.1.7 Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.1.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Langsung

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama (H1), dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $T_{hitung}$  sebesar  $7,447 > 1,6657$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati (2014), bahwa terdapat Pengaruh Asli Daerah terhadap Belanja Langsung.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung, hal ini dibuktikan bahwa H1 diterima artinya Pengaruh Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung selain itu Pendapatan Asli daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap Belanja Langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah suatu daerah meningkat maka Belanja Langsung juga ikut meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menjelaskan bahwa Pendapat Asli Daerah memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung.

Berdasarkan data sekunder yang diolah, terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena meningkatnya

permintaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana hibah pemerintah pusat, dan investasi di daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka bisa meningkatkan Belanja Langsung daerah yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD (anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

#### **4.1.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Langsung.**

Berdasarkan hasil analisis hipotesis kedua (H2), dapat diketahui bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum (X2) dengan Belanja Langsung (Y). dapat dibuktikan dengan nilai signifikan signifikan 0,05 dengan  $t_{tabel} = 1,6657$  dapat diketahui bahwa nilai signifikan  $t$  sebesar  $0,000 > 0,05$  dan  $t_{hitung}$  sebesar  $6,889 < 1,6657$ . Maka semakin besar Dana alokasi Umum maka pembangunan infrastruktur dan sarana kebutuhan masyarakat terpenuhi, ini sangat membuktikan erat kaitan hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Langsung, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati (2014), Hanisa (2019).

Dana Alokasi Umum yang ber sumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN. Dengan meningkatkan Belanja Langsung pemerintah daerah yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

#### **4.1.7.3 Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Langsung.**

Dari hasil analisis data perolehan nilai Dari  $F_{hitung} 180,883 > F_{tabel} 2,34$  dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), secara simultan terhadap Belanja Langsung (Y).

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan data skunder yang diolah, terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat. Ketika PAD suatu daerah naik maka pengaruh Belanja Langsung Daerah juga meningkat. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan belanja langsung.

## **V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan seperti yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah (X1) secara parsial berpengaruh terhadap belanja langsung. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji t dengan nilai thitung sebesar  $7,447 < 1,6657$  , dengan nilai signifikan  $0,000 > 0,05$ .maka semakin tinggi pendapatan daerah maka belanja langsung akan tetap lancar.
2. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh secara parsial dengan belanja langsung, dengan membuktikan nilai uji t dengan nilai thitung sebesar  $6,889 < 1,6657$  , dengan nilai signifikan  $0,000 > 0,05$ . Maka pengaruh antara dana alokasi umum dengan belanja langsung memiliki hubungan yang signifikan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan sumber – sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD, memperhatikan alokasi belanja yang dikeluarkan, meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik. Dan diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan infrastruktur yang ada, sehingga ini akan memacu meningkatnya pendapatan asli daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan indikator untuk melihat seberapa pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Langsung , menggunakan data laporan keuangan lima tahun terakhir, serta memperluas lokasi penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLIDAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Spe- cial Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLIDAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindahrahmawati

- HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.).  
*PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.).  
*PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).
- (Jumiati & Indriani, 2019)Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma*, 4(2), 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur indahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.

- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya UrsillaLubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).(HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, n.d.)
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma, 4(2)*, 190–205.
- Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATANASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati*, 1–29. nur iindahrahmawati
- HENRI PAULUS GERUNGAN1, DAVID PAUL ELIA SAERANG2, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara)*. 1, 233–245.
- Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation*.2(2), 90–96.
- Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
- Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya UrsillaLubis*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014). (Adyatma & Oktaviani, 2015)Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015).

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Rachmawati Meita Oktaviani, Erdi Adyatma, 4(2), 190–205.*

Dan, P. A. D., Alokasi, D., & Dau, U. (2010). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Nur Indah Rahmawati, 1–29.* nur.iindahrahmawati

HENRI PAULUS GERUNGAN<sup>1</sup>, DAVID PAUL ELIA SAERANG<sup>2</sup>, V. I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). 1, 233–245.*

Jumiati, E., & Indriani, M. (2019). *The Influence of Regional Revenue , Balance Funds , Special Autonomy Funds , and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation Economic Growth , Capital Expenditure Allocation. 2(2), 90–96.*

Setiyawati, N. H. & H. (2014). *Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah. XVIII(01), 45–58.*

Syariah, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan ) Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus. *Hanisya Ursilla Lubis.*

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.(2014).*



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

**SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Yulia Defitri, SE. M.Si  
NIDN : 1023078301  
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ III d  
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi terhadap Belanja Lngsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Privinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020**, yang dilaksanakan tahun akademik 2020/2021 bersifat **original** dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Juli Sultrani, SE.M. Si )  
NIDN. 1017116201

Solok, 1 Februari 2021

Ketua,

( Siska Yulia Defitri, SE. M.Si )  
NIDN. 1023078301

Menyetujui,  
Kepala LP3M UMMY  
( DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM )  
NIDN. 1019017402